

**PEMBERDAYAAN PERAJIN
INDUSTRI ROTAN PASCA BENCANA
OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Wilda Maulidia

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno, Km. 20, 45363, Indonesia

E-mail: wildaamaulidiala@gmail.com

Hasna Azmi Fadhilah

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno, Km. 20, 45363, Indonesia

E-mail: hasna@ipdn.ac.id

Hendrawati Hamid

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno, Km. 20, 45363, Indonesia

E-mail: hasna@ipdn.ac.id

ABSTRACT

This research is to find out and analyze the empowerment process, supporting factors and inhibiting factors faced, as well as efforts made by the Department of Trade and Industry to overcome obstacles in the empowerment of rattan industry crafters in the aftermath of a disaster. The research method used by the author in this study is descriptive qualitative. The data collection techniques are interviews, documents and observations. The data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and data verification. The result of this research apprenticeship show that empowerment of crafters in managing the rattan industry after disaster has been carried out. But in the implementation, the empowerment process has not been carried out optimally. Because the mindset of craftsmen who are still using old mindset, the absence of Standard Operating Procedures regarding the rattan industry which results in an ineffective upstream and downstream system, Limited funds owned by the government in providing assistance and the independence of the craftsmen in producing raw materials supporting the rattan industry. After disaster, Department of Trade and Industry has made efforts to overcome obstacles with: make a Standard Operating Procedures and allocated funds in accordance with needs and provides socialization in changing the mindset of rattan industry crafters and training to develop rattan industry businesses. The author suggests to the city government that in the future in making a development and empowerment planning, the city government must first make Standard Operating Procedures. As well as the process of the rehabilitation and reconstruction stages, the government must better understand its tasks and functions

Keywords: *empowerment, rattan, disaster*

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ialah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemberdayaan, faktor pendukung maupun faktor penghambat yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan terhadap perajin industri rotan pasca bencana. Metode yang digunakan penulis ialah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik reduksi data, pengumpulan data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan terhadap perajin dalam mengelola industri rotan pasca bencana telah dilakukan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses pemberdayaan belum berjalan secara optimal. Dikarenakan belum adanya Standar Operasional Prosedur mengenai industri rotan yang mengakibatkan belum efektifnya sistem hulu dan hilir, keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah dalam memberikan bantuan, serta ketidakmandirian perajin dalam menghasilkan bahan baku pendukung industri rotan. Pasca bencana, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan upaya dalam mengatasi hambatan diantaranya: membuat Standar Operasional Prosedur dan mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan serta memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para perajin industri rotan dalam mengubah *mindset* dan mengembangkan usaha. Penulis menyarankan kepada pemerintah kota, untuk kedepannya dalam membuat suatu perencanaan pembangunan dan pemberdayaan, pemerintah kota terlebih dahulu harus membuat Standar Operasional Prosedur. Begitu pula dengan proses tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah harus lebih memahami tugas pokok dan fungsinya.

Kata kunci: pemberdayaan, rotan, bencana

PENDAHULUAN

Rotan sebagai salah satu jenis flora asli hasil hutan Indonesia merupakan kekayaan alam unggulan yang pada saat ini sudah mulai mendunia. Gati Wibawaningsih sebagai Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) menerangkan bahwa pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera sebagai penghasil 80 persen bahan baku rotan yang ada membuat Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan industri furnitur dan kerajinan di dalam negeri (Jannah, 2009). Harga jual rotan Sulawesi lebih tinggi dibanding jenis rotan lainnya yang terdapat di luar pulau Sulawesi dikarenakan kualitas rotan nya yang lebih prima. Hasil dari industri rotan tersebut

berupa rotan yang dijadikan sebagai rotan polis ataupun rotan core, dan semua industri rotan tersebut dikelola dengan baik di Kota Palu.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Palu dijadikan sebagai pusat dari perdagangan di Sulawesi Tengah ditambah lagi dengan besarnya potensi rotan yang ada di wilayah ini mampu mendorong perkembangan industri pengolahan rotan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan industri rotan yang ada di Kota Palu berkembang dengan pesat, hal itu dibuktikan dengan dibangunnya Pusat Industri Rotan yang terletak di kawasan Industri Palu, kecamatan Palu Utara oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2014. Kota Palu yang merupakan titik temu antara tiga lempeng tektonik utama dunia (lempeng

Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia) atau disebut juga dengan sesar Palu Koro, membuat daerah ini rentan mengalami gempa bumi.

Gempa bumi dan tsunami yang diakibatkan oleh sesar Palu Koro pada tanggal 28 September 2018, dengan kekuatan 7,4 Skala Richter yang melanda Kota Palu, merupakan gempa bumi terbesar yang pernah terjadi selama ini dan berdampak sangat besar. Mulai dari banyaknya korban jiwa dan kerugian yang besar pada semua sektor serta rusak dan hilangnya sarana prasarana yang telah dibangun. Salah satunya ialah sarana dan prasarana Pusat Industri Rotan yang dibangun oleh pemerintah yang berlokasi di daerah kerentanan ekonomi. Adapun daerah kerentanan ekonomi yang sedang adalah Kelurahan Siranindi, Kelurahan Kamonji, Kelurahan Balaroa, Kelurahan Lere, Kelurahan Tanamodindi, Kelurahan Tanamodindi, Kelurahan Kawatuna, Kelurahan Poboya, Kelurahan Layana Indah, Kelurahan Talise, Kelurahan Donggala Kodi, Kelurahan Kabobona, Kelurahan Silae, kelurahan Tipo, Kelurahan Buluri, Kelurahan Watusampu, Kelurahan Mamboro, Kelurahan Taipa, kelurahan Kayumalue Pajeko, Kelurahan Mamboro Barat, Kelurahan Panau, Kelurahan Lambara, Kelurahan Baiya, Kelurahan Pantoloan, dan Kelurahan Pantoloan Boya (Sarapang, 2019). Selain itu, gempa bumi tersebut juga mengakibatkan sebagian sarana dan prasarana pribadi yang dimiliki oleh perajin dalam mendukung aktivitas industrinya.

Akibat dari tsunami yang menyapu kawasan industri rotan membuat sebagian besar perajin kehilangan sumber mata

pencaharian dan membuat para perajin memiliki rasa trauma untuk mengaktifkan kembali usaha industrinya, yang mana lokasi kawasan industri tersebut berada di sekitar pantai bekas tempat kejadian tsunami (Sulaiman, 2018). Para perajin rotan juga terkendala pada modal yang minim dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terlebih lagi untuk memikirkan pembangunan usaha rotan yang baru. Selain itu, akibat dari terganggunya produktivitas industri rotan di Kota Palu berdampak pada keseimbangan dari produksi rotan baik di dalam maupun luar negeri, karena hasil rotan yang akan di ekspor baik itu ke pulau Jawa, luar pulau Jawa, maupun luar negeri akan berkurang dengan adanya masalah tersebut.

Pasca bencana, pemerintah daerah telah berupaya untuk menghidupkan kembali industri rotan di Kota Palu dengan memberikan bantuan dana berupa modal. Tetapi pada fakta di lapangan menunjukkan, para perajin belum sepenuhnya merasakan bantuan. Hal tersebut terbukti dari kurangnya peralatan ataupun bantuan dana untuk mendukung modal usaha mereka. Dalam proses pemberdayaan pasca bencana hal yang terpenting ialah mendorong dan meningkatkan kembali kreativitas dan inovasi mereka yang sempat terganggu akibat bencana tsunami. Trauma pasca bencana alam tsunami tersebut dapat menyebabkan berkurangnya kreatifitas dan inovasi dari para perajin serta rasa takut yang dimiliki untuk mengaktifkan kembali usaha industri. Secara psikologis proses pemberdayaan kepada masyarakat yang pernah menjadi korban tsunami dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, dengan harapan mampu mengurangi

trauma dan rasa takut akan bencana alam yang pernah terjadi sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup perajin industri rotan, dikarenakan dengan adanya upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat perajin, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menumbuh kembangkan kreatifitas dan inovasi dalam membangun kembali usaha mereka. Selain itu, pemberdayaan yang bertujuan dalam pengembangan usaha juga akan berdampak pada pendapatan IKM serta mampu membantu pembangunan usaha masyarakat di sekitarnya (Julika, 2016; Putra, dkk, 2018; Setiyowati, 2018; Karwati, 2018).

Menilik fakta diatas, penulis kemudian tertarik mengamati topik terkait upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memberdayakan perajin industri rotan pasca bencana di Kota Palu. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemberdayaan, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk memperkaya literatur pemberdayaan pasca bencana (Moreno dan Shaw, 2018; Shafique dan Warren, 2018; Tohani dan Wibawa, 2019; Sim dkk, 2019; Hafida, 2019).

KAJIAN PUSTAKA

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu indikator dalam pencapaian menuju Indonesia emas 2045. Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam

secara optimal, sehingga masyarakat belum mampu memiliki jumlah pendapatan yang rendah bahkan dapat digolongkan menjadi masyarakat miskin. Hamid (2018: 28) mengemukakan bahwa masyarakat miskin karena faktor dari segi struktural ditandai dengan tidak mempunyai kualitas tenaga kerja yang tinggi, jumlah modal yang memadai, luas tanah dan sumber daya alam yang cukup, keterampilan dan keahlian yang cukup tinggi, kondisi fisik jasmani dan rohani yang cukup. Oleh karena itu, diperlukannya perencanaan program yang baik dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia ini tentunya diperlukan kolaborasi yang baik antar pihak masyarakat, pemerintah maupun swasta. Pemerintah memiliki peran dalam hal mengembangkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya ialah melalui pemberdayaan. Kartasasmita (1996:145) mengemukakan bahwa: “pemberdayaan ialah upaya dalam membangun daya itu sendiri, dengan memberikan motivasi dan membangkitkan kembali kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki serta upaya untuk membangkitkannya. Selanjutnya upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi/daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri”. Pemberdayaan mengarah pada kemampuan orang yang tergolong dalam kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mencukupi kebutuhan dasarnya yang bukan sekedar bebas untuk menyampaikan pendapat tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. Selain itu, mereka juga dapat mencapai sumber-sumber produktif yang mampu membantu dalam meningkatkan

kesejahteraan serta mampu ikut serta dalam proses pembangunan (Hamid, 2018:11). Dalam era reformasi saat ini, konsep pembangunan yang digunakan ialah pembangunan yang berpusat pada rakyat melalui pemberdayaan dengan harapan mampu membangkitkan penguatan diri masyarakat. Hikmat (2013:78) menyebutkan bahwa “karakteristik dari pembangunan berpusat pada rakyat ini ialah nilai produk, partisipasi, dan mutu kehidupan kerjanya”. Manusia yang menjadi subyek dalam penyelesaian masalah yakni dengan memperbaiki mutu kehidupan. Keberhasilan dalam membangkitkan penguatan diri serta memperbaiki mutu kehidupan, tentunya akan ikut serta dalam menentukan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap pembangunan indeks manusia yang mana dapat dilakukan melalui peningkatan daya saing usaha.

Peningkatan daya saing usaha juga merupakan salah satu proses yang mendukung dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Proses ini merupakan usaha yang dilakukan dalam menunjang keuntungan dibidang ekonomi yang bisa berdampak pada peningkatan pendapatan yang mereka miliki. Menurut Hamid (2018:104) bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, diantaranya:

1. Meningkatkan pengetahuan teknis melalui peningkatan produktivitas dalam memperbaiki mutu untuk menambah nilai produk
2. Perbaiki manajemen untuk mengefisienkan usaha serta mengembangkan jejaring kemitraan
3. Meningkatkan minat kewirausahaan dalam mengoptimalkan peluang bisnis melalui potensi keunggulan lokal yang ada
4. Meningkatkan aksesibilitas baik itu dari segi informasi, pasar, maupun modal
5. Advokasi pada kebijakan yang bertujuan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

Dalam mempermudah proses pemberdayaan masyarakat juga diperlukan pembentukan kelompok sehingga mampu mendorong terselenggaranya bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Selain itu, berkembangnya model pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan dan pengembangan ekonomi, membuat manfaat dan dampak menjadi salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam menjaga kondisi kelestarian lingkungan yang menjadi salah satu faktor yang akan menentukan keberlangsungan dari kegiatan investasi dan ketersediaan akan bahan baku yang ada. Berdasarkan uraian teori diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemberdayaan empat bina oleh Mardikanto sebagai landasan yang terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pemberdayaan yang dilakukan terhadap perajin industri rotan di Kota Palu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 1
Data Informan

No	Informan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1
2	Kepala Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka	1
3	Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri	1
4	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri	1
5	Kepala Seksi Bina Usaha	1
6	Perajin Industri Rotan	10
Jumlah		15

Sumber: Olahan Penulis, 2019.

Penulis memilih 15 orang informan diatas, dikarenakan pihak-pihak diatas yang berperan penting dalam sebagai pihak pemberdaya maupun pihak yang diberdayakan. Dalam melakukan observasi, penulis mengamati hal-hal yang berkaitan dengan proses pemberdayaan perajin dengan mengamati lokasi pasca bencana sekitar tempat industri rotan, sarana pendukung industri rotan pasca bencana, kondisi psikologis perajin pasca bencana, serta keterlibatan pemerintah. Selain itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui dokumentasi terhadap kondisi tempat industri rotan pra bencana dan pasca bencana, program yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta arsip-arsip lain terkait perajin rotan. Sedangkan dalam menganalisis

data guna memperkuat data yang ada, penulis menggunakan teknik analisis data diantaranya: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca bencana tahun 2018 di Kota Palu, para perajin industri rotan tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda yang bilamana dibandingkan dengan situasi industri rotan pra bencana sangatlah berbeda. Bencana alam yang terjadi mengakibatkan rumah produksi maupun alat-alat yang mendukung hasil produksi olahan rotan, sebagian hilang akibat ter dampak tsunami dan gempa bumi. Bahkan ada beberapa perajin yang rumah produksinya masih utuh, akan tetapi alat-alat yang bisa digolongkan harganya mahal, dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti yang dikatakan oleh salah satu istri perajin rotan bernama Jamaluddin pada tanggal 13 Januari 2020 “Susahnya dalam mengejar hasil produksi dalam jumlah besar pasca bencana ini, selain modal yang kurang dalam membeli ataupun mencari bahan baku, alat juga hilang dijarah waktu masih ditinggal mengungsi, makannya hasil produksi pasca bencana ini hanya dua sampai tiga set per bulannya”.

Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan yang ada di kalangan para perajin industri rotan tergolong belum sejahtera, dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup serta kebutuhan dalam mengelola industri rotan tidak sama seperti sebelum bencana. Pasca Bencana tersebut tentunya membuat para perajin sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah Kota Palu dalam memenuhi kebutuhan

hidup dan kebutuhan industri mereka. Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal itu terbukti dari adanya proses perencanaan melalui rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016-2021. Berikut ini proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian terhadap perajin industri rotan pasca bencana:

a. Bina Manusia

Dalam proses pemberdayaan terhadap perajin industri rotan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebelum bencana telah memberikan pengetahuan kepada perajin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan industri rotan, baik yang disampaikan melalui sosialisasi maupun kegiatan pembinaan lainnya yang berupa pembinaan akan penggunaan peralatan serta manajemen dasar dalam membangun suatu industri. Berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara yang dilakukan penulis, pengetahuan yang dimiliki para perajin industri rotan sebelum bencana maupun pasca bencana telah ada. Akan tetapi, pengetahuan tersebut tentunya harus diikuti dengan kondisi psikologis yang baik. Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pengetahuan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih seputar proses pengolahan rotan dan belum memberikan kontribusi dalam membagi pengetahuan terkait *trauma healing* terhadap para perajin yang mengalami bencana gempa bumi dan tsunami kemarin. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Amsal selaku Kepala Seksi Pemberdayaan

Sumber Daya Industri pada tanggal 16 Januari 2020 yaitu “memang ada beberapa perajin yang trauma nya masih berat, akan tetapi kami belum memberikan hal-hal yang berkaitan dengan penguatan kembali pasca bencana”.

Pasca bencana, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah memberikan program-program yang dilakukan dalam hal mendukung para perajin rotan untuk dapat kembali mengaktifkan usaha industrinya. Adapun usaha yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengembangkan keterampilan para perajin ialah:

a. Meningkatkan keterampilan para perajin rotan sehingga mampu mengolah rotan menjadi kerajinan yang bukan hanya mengutamakan jumlah produksinya, akan tetapi juga memiliki kualitas yang lebih baik. Dari hasil wawancara bersama bapak Amsal, SE selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri pada tanggal 16 Januari 2020 mengatakan bahwa “kalau sejauh ini, baik itu sebelum bencana maupun sesudah bencana kami tetap memberikan pelatihan yang dimaksudkan supaya mereka para pengelola mampu menghasilkan produk yang berkualitas.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menaruh harapan besar kepada masyarakat khususnya perajin rotan untuk bisa memberikan kontribusi melalui peningkatan kuantitas maupun kualitas hasil produksinya dalam meningkatkan taraf perekonomian di Kota Palu.

b. Menarik minat kesadaran masyarakat bahwa Kota Palu memiliki sumber

daya alam yang melimpah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Risna selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri pada tanggal 15 Januari 2020 mengatakan bahwa “mereka sudah kita bina, akan tetapi mereka tidak mau tekun, tidak sabaran, maunya yang instan. Kalau dia buat hari ini harus laku hari ini juga, dari sebelum bencana sampai sesudah bencana mindset mereka masih mindset lama. Makannya kita biasa sosialisasikan tentang bagaimana cara berpikir yang baik dalam mempertahankan suatu usaha”.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga telah memberikan berbagai pemahaman terkait *mindset* yang baik dalam membangun dan mempertahankan suatu usaha agar tetap eksis dalam memenuhi kebutuhan pasar.

b. Bina Usaha

Pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki perajin rotan maupun yang diberikan dari pihak pemberdaya, belum sepenuhnya mampu menunjang keberhasilan suatu usaha industri rotan. Modal yang cukup serta proses pemasaran terkait mekanisme hulu dan hilir yang baik juga merupakan faktor penunjang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah memberikan bina usaha dalam bentuk bantuan alat-alat yang mampu menunjang jumlah maupun kualitas hasil produksi. Seperti yang dikatakan oleh ibu Masdinah, selaku Kepala Seksi Bina Usaha pada tanggal 15 Januari 2020 “kalau untuk usaha mereka sebelum dengan sesudah

bencana, berbeda jauh karena bisa dilihat dari hasil produksinya, serta jumlah perajin juga ada sebagian yang sudah tidak aktif lagi. Makannya kita berikan bantuan alat itu, akan tetapi dengan ketentuan mau membuat perjanjian untuk tetap aktif dalam usaha produksi industri rotan”.

Tabel 2

Perajin yang telah mendapatkan bantuan pasca bencana

Badan Usaha	Nama Perusahaan	Nama Pemilik
PO	Fatik Rotan	Aris Purwanto
PO	Meubel Rotan Bone Layana	Jamaludin
PO	Bamba Rattan	Kamardin, ST
PO	Cenderamata Rotan Palu	Lasennang
PO	CV. Palunesia	Syahrir
PO	Mebel Mega Riski	Jamaluddin
PO	Palu Mandiri Rotan	Herman
PO	Subur	Yusuf
PO	Irma jaya	Husein Ali Bahmid
PO	Meubel Rotan JIHAN	Ahmad

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2019

Dari hasil wawancara jelas bahwa pemerintah telah memberikan bantuan modal berupa alat dengan harapan mampu meningkatkan kembali kreativitas industri mereka. Di satu sisi, pak Syamsul selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan bahwa “sejauh ini bantuan alat yang kami berikan belum semua perajin mendapatkan bantuan, dikarenakan terkendala oleh keterbatasan

dana yang dimiliki. Oleh karena itu, kami masih berupaya membuat Standar Operasional Prosedur terlebih dahulu”. Tabel 2 di atas menunjukkan nama-nama perajin yang telah mendapatkan bantuan pasca bencana dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

Proses pembuatan Standar Operasional Prosedur tersebut, diharapkan mampu mempermudah aksesibilitas sumber daya. Selain itu, dengan pemerintah maupun pelaku industri mampu menerapkan standarisasi mutu dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi melalui pelatihan kompetensi teknis dan manajerial yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sehingga mampu meningkatkan promosi dan pemasaran industri rotan di era pasar global.

c. Bina Lingkungan

Usaha industri rotan di Kota Palu didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Dari 80% bahan baku rotan yang dihasilkan Indonesia berasal dari Sulawesi Tengah, dan 60% dari bahan baku kekayaan alam tersebut berada di Kota Palu. Namun dalam usaha industri tentunya akan ada dampak yang akan ditimbulkan khususnya dampak negatif, seperti limbah sisa proses produksi. Pasca bencana tsunami, Dinas Perdagangan dan Koperasi telah berupaya meminimalisir kerusakan lingkungan. Hal itu dibuktikan dari adanya kelompok yang anggotanya merupakan para perajin rotan sebelum bencana, yang mana pasca bencana mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan usaha industrinya. Kelompok yang dibentuk bernama kelompok *Sarara* ini beranggotakan 8 (delapan) anggota.

Dalam pelaksanaan pemberdayanya, kelompok *Sarara* tetap mendapatkan pembinaan dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan dibantu oleh pihak swasta yaitu NGO dan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan baru. Kelompok *Sarara* ini memiliki kegiatan yaitu mengelola limbah industri yang bukan hanya berasal dari limbah industri rotan melainkan juga mengelola kembali barang-barang hasil industri lainnya yang sudah tidak layak pakai untuk dapat didaur ulang. Ibu Zuidar selaku Ketua Kelompok *Sarara* pada tanggal 16 Januari 2020 mengatakan bahwa “sejauh ini kreasi yang kami buat dalam mengelola kembali limbah rotan itu masih dalam membuat souvenir souvenir kecil, tetapi seiring berjalannya waktu kami juga mulai dilatih membuat sanggul rambut dari rotan oleh NGO yang bekerjasama dengan pemerintah. Akan tetapi kalau untuk pengelolaan limbah yang lain, kami sudah sampai menghasilkan pendapatan hampir 10 Juta/orang per bulannya”.

d. Bina Kelembagaan

Memperluas jaringan merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan keberhasilan suatu industri rotan. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan hidup para perajin untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan industri rotan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian pasca bencana melakukan kerjasama dengan pihak swasta yaitu Himpunan Industri Meubel dan Kerajinan (HIMKI). Himpunan Industri Meubel dan Kerajinan (HIMKI) yang merupakan organisasi non pemerintah ini, diperintahkan oleh Presiden Republik

Indonesia bapak Joko Widodo untuk berpartisipasi dalam membantu berbagai industri yang ada di luar Pulau Jawa. Himpunan yang dibentuk pada tahun 2017 ini, mulai bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian mulai tahun 2020. Sejauh ini, keterlibatan Himpunan Industri Meubel dan Kerajinan (HIMKI) baru bisa dilihat dari adanya pertemuan sekaligus sosialisasi antara pengurus himpunan, Pejabat Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait, serta seluruh perajin industri rotan di Kota Palu. Akan tetapi, sosialisasi ini telah dilakukan sekaligus dengan pembentukan kelompok HIMKI di Kota Palu.

Kerjasama yang dibangun antar pihak pemerintah, non pemerintah serta masyarakat ini dilakukan dalam rangka berkonsentrasi di bagian pengembangan industri hilir dari industri rotan. Hal tersebut dilakukan agar mampu meningkatkan kembali nilai ekspor industri rotan kembali seperti semula pada masa pra bencana, dikarenakan adanya perubahan jumlah pabrik rotan poles dari yang berjumlah 29 pabrik menjadi 16 pabrik pasca bencana tsunami. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berharap agar Himpunan Industri Meubel dan Kerajinan (HIMKI) mampu dalam melaksanakan kerjasama dan mengembangkan industri rotan yang dilakukan di Kota Palu dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam memberdayakan perajin industri rotan pasca bencana ialah sumber daya alam yang dimiliki dan merupakan faktor pendukung utama dalam usaha industri Kota Palu. Akan tetapi, sumber

daya alam tidak sejalan dengan situasi industri rotan para perajin. Hal ini dikarenakan kekhawatiran mereka akan lakunya hasil produksi yang mereka buat. Selain itu, adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pusat Industri Rotan Nasional (PIRNAS) juga merupakan faktor pendukung. Kawasan yang dibangun pada tahun 2011 ini merupakan kawasan yang bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan usaha industri rotan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kawasan ini belum digunakan secara maksimal. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Syamsul selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tanggal 27 Desember 2020 “pembangunan sarana di Kota Palu ini dari awal sudah salah, yang seharusnya Kawasan Industri terlebih dahulu yang dibangun kemudian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tetapi pada kenyataannya terbalik. Sehingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibangun oleh pemerintah tidak digunakan secara maksimal”.

Usaha industri rotan di Kota Palu yang sudah berlangsung lama ini ternyata belum adanya Standar Operasional Prosedur yang mengatur. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh bapak Syamsul selaku Kepala Dinas pada tanggal 27 Desember 2020 yang mengatakan bahwa “Tidak adanya Standar Operasional Prosedur menjadi penghambat kalau kita ingin bersaing dengan pasar global karena kalau yang sudah ada SOP itu kan sudah bisa dijamin kebersihannya, pokoknya kualitasnya pasti beda”. Hal tersebut menyebabkan hanya sebagian dari para perajin industri rotan yang mampu memasarkan barang

hasil produksinya ke luar provinsi maupun luar negeri serta menjadikan sistem hulu dan hilir yang belum maksimal yang mengakibatkan belum adanya pihak ketiga atau yang biasanya disebut sebagai investor ingin menjadi pihak perantara dalam pemasaran. Belum adanya investor ini juga dikarenakan kurangnya modal ditambah dengan adanya bencana yang mengakibatkan pemerintah dan masyarakat lebih mengutamakan perbaikan kerusakan sebagai dampak dari bencana. Dengan demikian, maka eksistensi Kota Palu dalam menghasilkan dan memasarkan produksi rotan akan semakin berkurang. Pemikiran lama yang dimiliki para perajin rotan juga menjadi faktor penghambat yang mana hal tersebut membuat mereka belum sepenuhnya mampu kembali aktif dan lebih berkembang.

Dalam pengelolaan industri rotan, tentunya membutuhkan bahan baku pendukung yang mampu menjadikan produksi lebih berkualitas. Untuk mendapatkan bahan baku pendukung yang murah seperti fitrit sangatlah susah, karena bahan baku ini hanya ada diproduksi di luar provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, bahan baku ini memiliki harga yang lebih mahal dibanding bahan baku lainnya. Sedangkan para perajin industri rotan Kota Palu, belum memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memproduksi secara mandiri bahan baku tersebut. Bapak Syamsul selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga mengatakan bahwa “proses pemberdayaan juga terkendala pada keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah Kota Palu berhubung pembangunan tidak hanya dilakukan di sektor perindustrian, tetapi di semua sektor dengan harapan

mampu mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat”. Menindaklanjuti berbagai hambatan yang dihadapi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan berbagai upaya, antara lain :

a. Membuat Standar Operasional Prosedur

Guna perluasan pemasaran akan hasil industri rotan, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang mekanisme hulu dan hilir terkait pengelolaan industri rotan. Oleh karena itu, bapak Syamsul selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengatakan bahwa “pasca bencana ini, kami sedang melakukan pembuatan Standar Operasional Prosedur. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas produksi dan mengembangkan usaha perajin, serta mampu bersaing secara global sehingga industri rotan mampu kembali berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palu”.

b. Membangun kembali sistem hulu hilir Sinkronisasi akan sistem hulu dan hilir industri rotan, tentunya sangat berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup para perajin industri rotan pasca bencana. Oleh sebab itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mulai membangun kembali sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, non pemerintah, dan perajin rotan. Bapak Amsal selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri mengatakan bahwa “pasca bencana ini, kami membangun kembali sistem hulu dan hilir dengan

- menjalin kerjasama dengan pihak non pemerintah seperti Himpunan Industri Meubel dan Kerajinan (HIMKI). Upaya tersebut kami lakukan untuk meningkatkan penguatan pasar industri rotan utamanya pasca bencana”.
- c. Memberikan sosialisasi dalam mengubah *mindset* para perajin industri rotan
- Dalam memberikan pelatihan-pelatihan, bapak Amsal selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Industri mengatakan bahwa “dinas Perdagangan dan Perindustrian pasca bencana bukan hanya memberikan sosialisasi mengenai mekanisme pengelolaan rotan yang benar, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang cara berfikir yang terbuka akan perkembangan zaman”. Dengan demikian upaya tersebut diharapkan mampu memberikan perubahan terhadap cara berpikir dan mampu merubah perilaku yang dianggap kurang tepat untuk diterapkan dalam dunia usaha.
- d. Pengalokasian dana sesuai dengan kebutuhan
- Dana yang dialokasikan pemerintah daerah kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum sepenuhnya difokuskan kepada pemberdayaan terhadap perajin rotan. Bapak Syamsul selaku Kepala Dinas mengatakan “keterbatasan dana dikarenakan pembangunan bukan hanya dilakukan dalam sektor perindustrian, menjadikan kendala bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam proses pemberdayaan sehingga dalam

pelaksanaannya Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang lebih diprioritaskan”.

- e. Memberikan pelatihan-pelatihan guna mengembangkan usaha industri rotan
- Dalam mengatasi hambatan yang mana perajin belum mampu memproduksi bahan baku pendukung secara mandiri, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian pasca bencana melakukan upaya dengan membangun kerjasama dengan Himpunan Industri Meubel dan Kerajinan (HIMKI) untuk mulai memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada para perajin industri rotan.

KESIMPULAN

Dalam proses pemberdayaan terhadap perajin industri rotan pasca bencana, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan industri rotan dalam membangun kembali industri. Sejauh ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah memberikan bantuan alat kepada perajin industri rotan yang ter dampak bencana, walaupun belum secara keseluruhan perajin mendapatkan bantuan tersebut. Pasca bencana, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga sedang dalam proses pembuatan Standar Operasional Prosedur serta membangun kerjasama dengan Himpunan Industri Meubel dan Kerajinan (HIMKI) dalam membantu para perajin untuk meningkatkan kualitas produk industri rotan Kota Palu. Akan tetapi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum memberikan kontribusi dalam membagi

pengetahuan terkait *trauma healing* terhadap para perajin yang mengalami bencana. Kenyataan tersebut berbanding terbalik dengan isi dari Pasal 44 serta Pasal 8 yang berisi tentang 6 (enam) hak masyarakat pasca bencana, salah satunya ialah mendapatkan bantuan berupa pelayanan termasuk dukungan psikososial.

Terkaithal diatas, penulis menyarankan agar Pembuatan Standar Operasional Prosedur seharusnya merupakan hal utama yang harus dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengefektifkan sistem hulu dan hilir dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan. Selain itu, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Dinas Perdagangan dan Perindustrian seharusnya lebih mampu memahami tugas pokok dan fungsinya mengenai proses dari kedua tahapan tersebut. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, pemerintah kota sampai saat ini hanya berfokus pada pembangunan kembali usaha dan belum memperhatikan mental dan *mindset* masyarakat pasca bencana. Oleh karena itu, ke depannya penulis berharap kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk lebih mampu memahami tugas pokok dan fungsinya, mampu dalam meningkatkan motivasi bagi para perajin serta memberikan bantuan yang lebih maksimal sehingga mampu meningkatkan produktivitas industri rotan di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan masyarakat*. Makassar: De la Macca
- Hikmat, H. M. (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cidesindo.
- Mardikanto, T. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Hafida, S. H. N. (2019). "Pemberdayaan Perempuan sebagai Bentuk Penguatan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Situasi Bencana di Kabupaten Klaten", *Jurnal Solma, Vol. 8, No. 1*.
- Hartanti, G. (2012). Perkembangan Material Rotan dan Penggunaan Di Dunia Desain Interior. *Jurnal Humaniora Vol.3 No.2* (499). <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3354>
- Manore, M. (2019). *Pengertian Bencana secara Umum: Jenis, Macam, Penyebab Bencana Alam*. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-bencana-alam.html>
- Jannah. (2009). *Kemenperin: ekspor industri furnitur dan kerajinan Januari Naik 8,2 persen*. <https://tirto.id/djLX>
- Julika, S. R. (2016). Pemberdayaan Kelompok Infomasi Dalam Mendorong Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6*. <https://doi.org/10.24929/fisip.v10i2.285>
- Karwati, Lilis, dkk. (2018). Women Empowerment to Build Entrepreneurship. *Journal of Nonformal Education, Vol. 4, No. 2*. <https://doi.org/10.15294/jne.v4i2.16005>
- Moreno, Jenny, and Shaw, D. (2018). Women's Empowerment Following Disaster: a Longitudinal Study of Social Change. *Natural Hazards, Vol. 92*. <https://doi.org/10.1007/s11069-018-3204-4>
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- Putra, P. D, dkk. (2018). Peningkatan Pendapatan Peternak Bebek melalui Pelatihan Pakan Ternak dan Kewirausahaan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 2 Nomor 1 Maret*.
- Sarapang, H. T. (2019). Analisis Kerentanan Bencana Tsunami Di Kota Palu. *Jurnal Spasial Vol.2 No.6*, 435. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/25325>
- Setiyowati, D. dan Sulistyowati, D. R. (2018). Pen Culture sebagai Solusi Peningkatan Pendapatan Nelayan Rajungan di Jepara. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 2 Nomor 1*. <http://dx.doi.org/10.30595/jppm.v2i1.1785>
- Shafique, Kamran, dan Warren, Clive M. J. (2018). Empowerment and Legitimization of Effected Communities in Post-Disaster Reconstruction. *Procedia Engineering, Vol. 212*.
- Sim, T. dkk. (2019). Post-disaster Psychosocial Capacity Building for Women in a Chinese Rural Village. *International Journal of Disaster Risk Science, Vol. 10*. <https://doi.org/10.1007/s13753-019-0221-1>
- Sulaiman, M. R. (1 Oktober 2018). <http://www.suara.com>. *Tsunami dan Gempa Palu*.
- Tohani, E. , dan Wibawa, L. (2019). The Role of Social Capital in Disaster Management of Disaster Vulnerable Village Community on the Merapi Eruption. *Cakrawala Pendidikan, Vol. 38, No. 3*. <https://doi.org/10.21831/cp.v38i2.21821>